

Kebijakan Digitalisasi dan Kesiapan Pengendalian Internal (Studi pada Pemerintah Desa)

Fajar Kholillulloh¹, Laila Oshiana Fitria A'zizah², Jefrianto Tandil Bunna³

^{1,2} Accounting Major, Faculty of Economic and Business

Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Corresponding Author, Email: fk999@ums.ac.id*

Abstrak

Perkembangan teknologi dan kebijakan pemerintah telah mendorong terjadinya urgensi penerapan sistem pengendalian internal yang baik. Tujuan penelitian ini adalah melakukan proses evaluasi terhadap sistem pengendalian internal yang telah di aplikasikan pada kantor Pemerintah desa Dompok, Kemaran, Klaten, Jawa Tengah. Penelitian menerapkan metode kualitatif studi kasus untuk mendalami objek penelitian dan mengumpulkan data. Data primer dan sekunder yang berkaitan dengan PBJDesa Pemerintah desa Dompok dijadikan sumber data penelitian yang nantinya dijadikan sebagai dasar penarikan kesimpulan. Pengumpulan data pada penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi yang terdiri dari angket, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menurut konsep Miles dan Huberman (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan).

Kata kunci: Sistem pengendalian internal, dana desa, digitalisasi,

1. INTRODUCTION

Perkembangan teknologi telah merubah cara pandang dan cara kerja berbagai entitas menuju era digitalisasi. Tidak hanya entitas swasta, selama beberapa tahun terakhir efek digitalisasi mulai merambah kepada entitas pemerintahan (Fountain, 2001). Di Indonesia sendiri, penerbitan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi pendorong utama bagi kebanyakan entitas di Indonesia menuju era digitalisasi melalui program e-government. E-government merupakan Upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai teknologi informasi dan komunikasi (Burn & Robins, 2003). Dengan kata lain, e-government dibangun untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien (Silcock, 2001). Penerapan e-governement akan memberikan dampak kepada seluruh unsur operasional pemerintahan dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat

(Srivastava, 2011).

Dengan perubahan sistematis yang sangat komprehensif dalam pengelolaan entitas pemerintahan, era digitalisasi tidak hanya memberikan perubahan yang menonjol pada bagaimana cara pemerintah menjalankan operasional pelayanannya, namun tentunya akan memberikan perubahan pada bagaimana pemerintah melakukan pengelolaan secara internal atau internal governance. Pada pengelolaan internal sendiri, pengendalian internal menjadi salah satu aspek penting organisasi dalam melakukan pengelolaan (Zhao et al., 2023). Sehingga, perkembangan teknologi melalui era digitalisasi tentunya akan memberikan efek langsung pada pengendalian internal organisasi.

Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia membuat kebijakan mengenai pengelolaan pemerintah desa melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan diresmikan oleh Bapak Susiolo Bambang Yudhoyono yang menjadi Presiden Republik Indonesia di masa itu. Peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan keleluasaan khusus bagi perangkat desa dalam melakukan pengelolaan pemerintah di ranah desa. Peraturan tersebut juga membuat pemerintah harus mengalokasikan dana APBN yang akan disalurkan kepada seluruh pemerintah desa di Indonesia melalui program Dana Desa.

Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) pada tahun 2017, Program dana desa ini menjadi salah satu objek yang sangat rentan dilakukan tindak kecurangan. Statement tersebut didasarkan kepada realisasi jumlah dana desa yang sangat besar namun dilakukan ketika sistem tata kelola pemerintah desa masih berjalan kurang baik. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh ICW, pada tahun 2015-2017 banyak terjadi kasus penyelewengan dana desa. Beberapa sektor yang menjadi modus penggelapan anggaran dana desa antara lain seperti kasus penggelembungan anggaran sebesar 11%, kegiatan dan proyek fiktif sebesar 12%, laporan fiktif sebesar 13%, penggelapan sebesar 25% dan sektor penyalahgunaan anggaran sebesar 39% yang menjadikannya sebagai sektor yang paling sering dilakukan penyelewengan anggaran dan korupsi dana desa. Jumlah kasus tersebut meningkat setiap tahunnya. Kecurangan sendiri terjadi atas dasar berbagai faktor, yaitu faktor tekanan, faktor kesempatan, faktor rasionalitas, dan faktor kemampuan (Wolfe & Hermanson, 2004).

Dengan adanya ketimpangan antara kesiapan pengelolaan pemerintah desa dalam menjalankan kebijakan pemerintah, dan perkembangan teknologi yang

mengharuskan sistem pengendalian internal yang baik, penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana kondisi sistem pengendalian internal pada pemerintah Desa Dompol, serta menghasilkan sebuah bahan evaluasi bagi pemerintah Desa Dompol agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam perbaikan di masa depan.

2. Theoretical Framework

2.1 Sistem Pengendalian Internal

Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang berpengaruh langsung terhadap cara organisasi menjalankan aktivitas operasionalnya dan bagaimana cara organisasi mengelola kepatuhannya atas setiap regulasi, sudah seharusnya perhatian khusus ditujukan pada aspek sistem pengendalian internal. Menurut American Institute of Accountant (AIA), Pengendalian Internal merupakan sebuah rencana yang dibentuk oleh organisasi, metode yang menjadi landasan, dan ukuran yang dikoordinasikan. Ketiga aspek tersebut digunakan sebagai cara organisasi dalam melindungi asset-asetnya, menilai akurasi, serta menilai kualitas data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial (Supriyono, 2016).

Di Amerika Serikat melalui *the Sarbanes-Oxley Act of 2002* dan *the Dodd-Frank Wall Street Reform And Consumer Protection Act of 2010* memasukkan peraturan yang spesifik pada ketentuan dalam menjalankan pengendalian internal yang mana kebanyakan berdasarkan pada *Framework* yang diterbitkan oleh *the Committee of Sponsoring Organizations of The Tradeway Commission (COSO)*, (Schantl & Wagenhofer, 2021). COSO sendiri mempublikasikan dua kerangka yang sudah dikenal di seluruh dunia. Kedua kerangka tersebut adalah *the internal control integrated framework* yang dipublikasikan pada tahun 1992, dan *COSO Entreprice Risk Management* yang di publikasikan pada tahun 2004. Kedua kerangka tersebut berbasis kepada konseptual yang sama sehingga memiliki keselarasan. COSO sendiri memiliki lima komponen utama yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, komunikasi dan informasi, dan monitoring aktivitas. Komponen-komponen tersebut mempunyai tujuan utama yaitu untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pada operasional perusahaan, reliabilitas pada pelaporan keuangan, serta patuh kepada hukum dan regulasi yang ada, (COSO, 2013). COSO sendiri hanya memberikan panduan secara umum,

sedangkan untuk rincian lebih detailnya akan disesuaikan berdasarkan organisasi masing-masing yang mengadopsinya (Länsiluoto et al., 2016).

2.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pemerintah Indonesia sendiri merumuskan pengertian pengendalian internal pada PP No. 60 Tahun 2008. Menurut peraturan tersebut, pengendalian internal adalah suatu proses yang integral pada setiap kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara konsisten dan berkala oleh seluruh aparatur pemerintah dalam upaya memberikan keandalan yang baik atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, pengamanan asset negara, dan tingkat ketaatan atas peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal pemerintahan sendiri didefinisikan sebagai sistem pengendalian internal yang menjadi panduan dan diterapkan diseluruh lingkungan pemerintahan baik di ranah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

PP No. 60 Tahun 2008 pasal 2 menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dibentuk dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tingkat efektifitas dan efisiensi pemerintah desa, kualitas pelaporan keuangan pemerintahan, pengamanan aset-aset pemerintahan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan. Menurut BPKP, instansi pemerintah tidak harus merancang secara khusus pengendalian untuk mencapai satu tujuan. Suatu kebijakan atau prosedur dapat saja dikembangkan untuk dapat mencapai lebih dari satu tujuan pengendalian (bpkp.go.id, 2019)

2.3 Penilaian Efektifitas Sistem Pengendalian Internal

Efektivitas adalah suatu bentuk sinkronisasi antara hasil yang telah ditetapkan atau diharapkan dengan hasil realisasi yang dicapai oleh setiap organisasi. Sehingga bisa dibilang, semakin tinggi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan atau terealisasi pada suatu organisasi maka memberikan makna bahwa tingkat efektivitas didalam organisasi tersebut sangatlah tinggi. Dalam konteks pengendalian internal, efektivitas pengendalian internal akan berjalan dengan baik apabila tujuan di terapkannya sistem pengendalian internal dapat tercapai.

Dalam menilai tingkat efektifitas Pengendalian internal, ada berbagai cara yang dapat dilakukan. Dapat menggunakan flow chart, atau dapat juga menggunakan kuesioner. Konsep Champion dapat digunakan sebagai acuan dalam

membuat kuesioner. Konsep champion adalah salah satu konsep yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengendalian internal melalui pemberian skala terhadap perangkat sosial, psikologi individu atau kelompok yang sesuai dengan aturan. Menurut Champion (Champion, 1990). pembagian skala pengukuran dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) 0,00 - 0,25 = Weak association
- 2) 0,26 - 0,50 = Moderation association
- 3) 0,51 - 0,75 = Moderation strong association
- 4) 0,76 - 1,00 = Strong association up to perfect association

Berdasarkan klasifikasi skala di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) 0% - 25% = Implementasi pengendalian internal dalam PBJDesa berjalan tidak efektif
- 2) 26% - 50% = Implementasi pengendalian internal dalam PBJDesa berjalan kurang efektif
- 3) 51% - 75% = Implementasi pengendalian internal dalam PBJDesa Berjalan cukup efektif
- 4) 76% - 100% = Implementasi pengendalian internal dalam PBJDesa Berjalan sangat efektif

3. Research Method

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus, penelitian kualitatif sendiri adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam suatu objek penelitian yang dapat berupa individu atau kelompok yang memiliki permasalahan social atau kemanusiaan. Sedangkan studi kasus sendiri merupakan salah satu bentuk penelitian dimana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, peristiwa, proses, atau aktivitas satu individu atau lebih (Creswell, 2014). Pada penelitian ini, metode studi kasus digunakan untuk mengidentifikasi secara mendalam mengenai pengaplikasian sistem pengendalian internal pada program dana desa.

Sumber data pada penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Sumber data primer atau data yang berasal dari informasi yang diperoleh dari informan pertama pada objek penelitian (Sekaran & Bouge, 2017) , diperoleh melalui

metode wawancara, kuesioner, dan dokumentasi pada proses pengadaan barang dan jasa. Sedangkan data sekunder penelitian ini berasal dari berbagai dokumen seperti RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa, peraturan pengendalian intern pemerintah, peraturan terkait pengadaan barang dan jasa desa.

Dalam proses pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan *non probability sampling* dengan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah Teknik penentuan sampel untuk mendapatkan informasi dengan pertimbangan tertentu (Sekaran & Bouge, 2017). Penelitian ini menggunakan kriteria sebagai berikut.

Tabel 3.1 Kriteria Sampel Penelitian

NO	KRITERIA
1	Termasuk sampel penelitian yaitu mereka yang tergabung dalam pemerintahan desa Dompol dan Lembaga kemasyarakatan desa dompol
2	Termasuk sampel penelitian yaitu mereka yang memiliki pengalaman terlibat pada program PBJDesa Dompol.
3	Termasuk sampel penelitian yaoutu mereka yang memiliki pengalaman terlibat pada program PBJDesa minimal satu tahun anggaran APBDesa.

Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dihasilkan beberapa informan yang memenuhi syarat sebagai sampel yaitu kepala desa, sekretaris desa, kaur pembangunan, kaur keuangan, dan tim pelaksana kegiatan.

Sebelum tahap penarikan kesimpulan, langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti antara lain mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner, proses wawancara dengan informan, dan mengumpulkan dokumen pendukung data penelitian. Setelah data memenuhi kebutuhan penelitian, proses analisis data dilakukan berdasarkan data-data tersebut dan menggunakan konsep Champion yang mana menggunakan skala persentase efektivitas.

Salah satu instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh data adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada para informan. Kuesioner yang disebarkan disusun berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal, misalnya seperti peraturan bupati atau

pedoman pengadaan barang dan jasa desa. Dalam proses pengisiannya, peneliti mendampingi para informan agar data kuesioner dapat terisi dengan baik. Pertanyaan yang muncul didalam kuesioner memiliki dua pilihan jawaban yaitu "Ya" =1, "Tidak"=0 atau disebut jenis pertanyaan tertutup. Rumus champion yang digunakan untuk melakukan perhitungan survei adalah sebagai berikut.

$$Persentase = \frac{\sum \text{Jawaban Ya}}{\sum \text{Jumlah pertanyaan}} \times 100\%$$

Rumus tersebut di susun oleh Champion, (1990) yang memiliki kriteria dalam penilaian sebagai berikut.

Tabel 3.2: Skala persentase penerapan pengendalian internal

Persentase	Kriteria Penerapan Pengendalian Internal
0%-15%	Sangat Tidak Memadai
16%-30%	Tidak Memadai
31%-45%	Kurang Memadai
46%-60%	Cukup Memadai
61%-75%	Memadai
76%-90%	Sangat Memadai
91%-100%	Sangat Amat Memadai

Sumber: Dean J. Champion

4. Result

4.1 Hasil Kuesioner

Pada proses pengisian kuesioner, diperoleh beberapa informan yang memenuhi kriteria sebagai bagian dari sampel yaitu kepala desa, sekretaris desa, pengelola keuangan, pengelola Pembangunan, dan tim pelaksana kegiatan. Tabel dibawah ini menunjukkan hasil survei atas lima unsur pengendalian internal dengan keterangan simbol \sum sama dengan jumlah total kuesioner, Q sama dengan jumlah pertanyaan, dan R sama dengan jumlah responden.

Tabel 4.1 Hasil Skor Presentase Lingkungan Pengendalian

Prinsip	Keterangan	Perhitungan			Frekuensi		Skor Persentase (%)	
		Q	R	Σ	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Penegakan integritas dan nilai etika	5	5	25	16	9	64%	36%
2	Komitmen terhadap kompetensi	11	5	55	38	17	69%	31%
3	Kepemimpinan yang kondusif	4	5	20	19	1	95%	5%
4	Pembentukan struktur tanggung jawab dan kewenangan.	9	5	45	43	2	96%	4%
5	Penegakan akuntabilitas individu	8	5	40	25	15	63%	37%
TOTAL		37	5	185	141	44	76%	24%

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner pada table 4.1 adalah lingkungan pengendalian pada desa Dompol sudah di aplikasikan dengan baik. Namun, kekurangan yang masih perlu diperbaiki adalah belum dibuatnya dokumen kebijakan secara tertulis.

Tabel 4.2 Hasil Skor Presentase Penilaian Risiko

Prinsip	Keterangan	Perhitungan			Frekuensi		Skor Persentase (%)	
		Q	R	Σ	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan.	17	5	85	67	18	79%	21%
2	Pengidentifikasian risiko.	11	5	55	28	27	51%	49%
3	Pertimbangan potensi kecurangan	6	5	30	14	16	47%	53%
4	Pengelolaan risiko selama perubahan.	5	5	25	7	18	28%	72%
TOTAL		39	5	195	116	79	59%	41%

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner pada table 4.2 adalah penilaian risiko PBJDesa pada desa Dompol belum di aplikasikan secara efektif. Beberapa kekurangan yang masih perlu diperbaiki adalah penilaian risiko bencana alam, risiko pencurian, risiko perubahan akibat dampak ekonomi, peraturan, dan kondisi di lapangan.

Tabel 4.3 Hasil Skor Kuesioner Persentase Aktivitas Pengendalian

Prinsip	Keterangan	Perhitungan			Frekuensi		Skor Persentase (%)	
		Q	R	Σ	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Mengembangkan kegiatan pengendalian.	9	5	45	40	5	89%	11%
2	Mengembangkan kegiatan pengendalian umum sistem informasi	5	5	25	22	3	88%	12%
3	Membuat kebijakan dan prosedur.	18	5	90	81	9	90%	10%
TOTAL		32	5	160	143	17	89%	11%

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner pada table 4.3 adalah kegiatan pengendalian PBJDesa pada desa Dompok sudah di aplikasikan dengan baik dan sudah dijabarkan dalam prosedur serta kebijakan. Namun, kekurangan yang masih perlu diperbaiki adalah belum dibuatnya dokumen prosedur dan kebijakan secara tertulis.

Tabel 4.4 Hasil Skor Persentase Informasi dan Komunikasi

Prinsip	Keterangan	Perhitungan			Frekuensi		Skor Persentase (%)	
		Q	R	Σ	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Memperoleh dan menghasilkan informasi yang relevan.	8	5	40	33	7	83%	17%
2	Komunikasi informasi internal dan eksternal	10	5	50	43	7	86%	14%
3	Komunikasi informasi eksternal	4	5	20	16	4	80%	20%
TOTAL		22	5	110	92	18	83%	17%

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner pada table 4.4 adalah informasi dan komunikasi yang dihasilkan oleh pemerintah desa Dompok sudah di taraf dapat memberikan informasi yang memadai bagi para pihak yang berkepentingan seperti tim pelaksanaan PBJDesa Dompok, dan perangkat desa Dompok.

Tabel 4.5 Hasil Skor Persentase Pengawasan

Prinsip	Keterangan	Perhitungan			Frekuensi		Skor Persentase (%)	
		Q	R	Σ	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Pemantauan berkelanjutan dan terpisah.	8	5	40	34	6	85%	15%
2	Evaluasi dan laporan kelemahan pengendalian internal	5	5	25	22	3	84%	12%
TOTAL		13	5	65	56	9	87%	13%

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner pada table 4.5 adalah aspek pengawasan yang dilakukan pada pelaksanaan PBJDesa Dompol telah dilaksanakan dengan baik. Penilaian secara eksternal dan internal sudah dilakukan, dan akan lebih baik jika proses pengawasan menghasilkan luaran berupa rekomendasi yang dihasilkan dari proses kuesioner dan wawancara, sehingga proses tindak lanjut dapat dilakukan dengan tujuan peningkatan kualitas pengawasan.

Tabel 4.6 Hasil skor SPI PBJDesa Pemerintahan Desa Dompol

Prinsip	Keterangan	Perhitungan			Frekuensi		Skor Persentase (%)	
		Q	R	Σ	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Lingkungan Pengendalian	37	5	185	141	44	77%	23%
2	Penilaian Risiko	39	5	195	116	79	59%	41%
3	Aktivitas Pengendalian	32	5	160	143	17	89%	11%
4	Informasi dan Komunikasi	22	5	110	92	18	83%	17%
5	Pengawasan	13	5	65	56	9	87%	13%
TOTAL		143	5	715	548	167	77%	23%

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner pada table 4.5 adalah nilai sistem pengendalian internal PBJDesa berdasarkan kerangka SPIP sebesar 77% yang mana masuk pada kategori sangat memadai. Hal ini menunjukkan bahwa SPI Pemerintah Desa Dompol berjalan dengan efektif terhadap kegiatan PBJDesa.

4.2 Hasil Wawancara

Pada proses wawancara, diperoleh beberapa informan yang memenuhi kriteria sebagai bagian dari sampel yaitu kepala desa, sekretaris desa, pengelola keuangan, pengelola Pembangunan, dan tim pelaksana kegiatan. Aspek pertama yang menjadi topik wawancara adalah aspek lingkungan pengendalian yang memiliki lima sub prinsip yaitu penegakan integritas dan nilai etika, kepemimpinan yang kondusif, struktur dan tanggung jawab, komitmen terhadap kompetensi, dan penegakan akuntabilitas individu. Hasil wawancara memberikan informasi bahwa penegakan integritas dan nilai etika di Desa Dompol masih berdasarkan ucapan lisan, belum dituangkan dalam dokumen tertulis. Pada aspek komitmen terhadap kompetensi, Pemerintah desa Dompol sudah menyesuaikan tugas masing-masing perangkat desa berdasarkan kompetensi bidangnya, namun kendala yang dialami untuk melakukan peningkatan kompetensi adalah banyaknya anggota perangkat desa Dompol yang sudah lansia. Pada aspek kepemimpinan yang kondusif, kepala desa Dompol termasuk pimpinan yang responsif dan tidak sering melakukan mutasi perangkat desa, serta kepala desa Dompol dinilai cukup profesional dalam menjalankan tugasnya. Aspek akuntabilitas individu dilakukan dalam komitmen bersama.

Aspek penting selanjutnya yang menjadi pembahasan dalam proses wawancara adalah prinsip penilaian risiko. Penilaian risiko sendiri memiliki empat sub prinsip yaitu penetapan tujuan instansi secara keseluruhan, identifikasi risiko, pertimbangan potensi kecurangan, dan pengelolaan risiko selama perubahan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari proses wawancara adalah Pemerintah desa Dompol telah menjalankan aspek penetapan tujuan instansi sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku. Untuk aspek penilaian risiko, Pemerintah desa Dompol belum mengaplikasikan dengan baik karena mereka lebih berfokus kepada bagaimana masalah diselesaikan bukan bagaimana risiko itu di nilai dan dicegah, kondisi ini juga menggambarkan bahwa aspek analisis risiko di Pemerintah desa Dompol belum dilaksanakan. Pada aspek pengelolaan risiko karena perubahan, Pemerintah desa Dompol sudah melakukan pengelolaan khususnya dalam hal teknis PBJDesa. Namun, untuk risiko-risiko yang cukup besar seperti perubahan sistem informasi, atau perubahan posisi pegawai, Pemerintah desa Dompol belum bisa dikatakan siap

untuk menghadapi itu.

Aspek penting selanjutnya yang menjadi pembahasan dalam proses wawancara adalah prinsip kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian sendiri memiliki tiga sub prinsip yaitu pengembangan kegiatan pengendalian, pengembangan pengendalian umum dan teknologi informasi, serta perinci pengembangan ke dalam kebijakan dan prosedur. Kesimpulan yang dapat ditarik dari proses wawancara adalah Pemerintah desa Dompol belum melakukan pengembangan kegiatan pengendalian dikarenakan belum dilakukannya proses penilaian risiko. Untuk aspek pengendalian umum dan teknologi informasi, Pemerintah desa Dompol sudah menerapkan sistem pengendalian secara sederhana, namun bisa dibilang cukup baik dan mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh perangkat desa Dompol.

Aspek penting selanjutnya yang menjadi pembahasan dalam proses wawancara adalah prinsip informasi dan komunikasi. Informasi dan Komunikasi sendiri memiliki tiga sub prinsip yaitu informasi yang relevan, komunikasi, serta bentuk dan sarana komunikasi. Kesimpulan yang dapat ditarik dari proses wawancara adalah Pemerintah desa Dompol telah menyediakan informasi yang sangat baik. Informasi hanya diperoleh dari orang-orang yang dapat dipercaya seperti perangkat desa dan orang yang bertanggung jawab langsung dengan kegiatan PBJDesa. Dari situasi tersebut, Pemerintah desa Dompol sudah dapat menyediakan informasi yang relevan kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal, menjalankan proses komunikasi yang baik, dan telah menggunakan sarana komunikasi yang mudah diterapkan dalam lingkungan kerja Pemerintah desa Dompol.

Aspek penting terakhir yang menjadi pembahasan dalam proses wawancara adalah prinsip pengawasan. Pengawasan sendiri memiliki dua sub prinsip yaitu evaluasi berkelanjutan dan terpisah, serta evaluasi penyelesaian audit. Kesimpulan yang dapat ditarik dari proses wawancara adalah Pemerintah desa Dompol selalu melakukan evaluasi setiap tahunnya, seluruh evaluasi juga telah terdokumentasi dalam bentuk laporan pertanggung jawaban. Pemerintah desa Dompol juga telah melakukan evaluasi terpisah bagi tiap-tiap kegiatan terutama PBJDesa. Untuk aspek evaluasi penyelesaian audit, Pemerintah desa

Dompol dengan segala keterbatasannya sudah melakukan perbaikan sistem pengendalian internal secara berkala, masukan dan temuan dari pihak Inspektorat juga menjadi bahan evaluasi yang ditindaklanjuti oleh pihak Pemerintah desa Dompol.

4.3 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang diperoleh, kelima aspek penting sistem pengendalian internal memperoleh nilai yang cukup memadai hingga sangat memadai. Rincian dari masing-masing aspek pengendalian tersebut adalah lingkungan pengendalian dengan perolehan nilai 83% atau sangat memadai, penilaian risiko dengan perolehan nilai 59% atau cukup memadai, aktivitas pengendalian dengan perolehan nilai 89% atau sangat memadai, informasi dan komunikasi dengan perolehan nilai 83% atau sangat memadai, dan pengawasan kegiatan dengan nilai 87% atau sangat memadai.

Dari hasil analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian Internal di Pemerintah desa Dompol sudah berjalan dengan cukup efektif. Sistem pengendalian internal juga sudah diaplikasikan berdasarkan dengan prinsip dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipastikan bahwa Pemerintah desa Dompol cukup siap untuk menghadapi kebijakan pemerintah dan perkembangan teknologi yang terus berkembang dan berubah

4.4 Saran

Berdasarkan hasil analisis data penelitian pada Pemerintah desa Dompol, usulan rekomendasi yang dapat di berikan oleh peneliti antara lain peningkatan intensitas pelatihan dan pelatihan bagi perangkat desa Dompol agar sistem informasi dapat menyediakan informasi dan dokumentasi yang baik. Perancangan metode penilaian risiko diharapkan mulai di susun agar kualitas sistem pengendalian internal dapat terus ditingkatkan.

BIBLIOGRAPHY

- Aapo Länsiluoto, Annukka Jokipii, Tomas Eklund. 2016. "Internal Control Effectiveness – A Clustering Approach", *Managerial Auditing Journal*, Vol. 31 Iss 1 pp. 5 – 34.
- bpkp.go.id. (2019). *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
<https://www.bpkp.go.id/kaltim/konten/2985/SPIP.bpkp>
- Burn, J., & Robins, G. (2003). Moving towards e-government: a case study of organisational change processes. *Logistics Information Management*, 16(1), 25–35. <https://doi.org/10.1108/09576050310453714>
- Champion, D. J. (1990). *Basic Statistic For Social Research* (3th Edition). Ronald Press Publication, John Wiley and Sons.
- COSO. (2013). *Internal Control-Integrated Framework: Executive Summary*.
- Creswell, W. J. (2014). *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (pp. 4–4). SAGE Publications.
- Fountain, J. E. (2001). *Building the virtual state : information technology and institutional change*. Brookings Institution Press.
- Länsiluoto, A., Jokipii, A., & Eklund, T. (2016). Internal control effectiveness – a clustering approach. *Managerial Auditing Journal*, 31(1), 5–34.
<https://doi.org/10.1108/MAJ-08-2013-0910>
- Schantl, S. F., & Wagenhofer, A. (2021). Optimal internal control regulation: Standards, penalties, and leniency in enforcement. *Journal of Accounting and Public Policy*, 40(3). <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2020.106803>
- Sekaran, U., & Bouge, R. (2017). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. Wiley.
- Silcock, R. (2001). Hansard Society for Parliamentary Government. In *Parliamentary Affairs* (Vol. 54).
- Srivastava, S. C. (2011). Is e-government providing the promised returns?: A value framework for assessing e-government impact. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 5(2), 107–113.
<https://doi.org/10.1108/17506161111131159>
- Supriyono, R. A. (2016). *Akuntansi Keperilakuan: Vol. Cetakan Pertama*. Gadjah Mada University Press.
- Zhao, T., Yan, N., & Ji, L. (2023). Digital transformation, life cycle and internal control effectiveness: Evidence from China. *Finance Research Letters*, 58. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104223>